

POTENSI KONFLIK TAK BOLEH DIKESAMPINGKAN

TNI Polri Diminta Tetap Komitmen Jaga Netralitas

YOGYA (KR) - Potensi konflik sekecil apapun dalam Pemilu tidak boleh dikesampingkan dan harus dapat diantisipasi agar tidak berkembang menjadi konflik yang besar yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Untuk itu TNI Polri diharapkan tetap berpegang teguh pada integritas dan komitmen netralitas.

"Netralitas adalah komitmen kita untuk tidak berpolitik praktis dengan mendukung salah satu calon yang saat ini sedang berkontestasi. Dan hal tersebut tidak bisa ditawarkan-tawar lagi karena menjadi kunci kepercayaan masyarakat terhadap institusi 'TNI Polri,'" kata Komandan Korem 072/Pamungkas, Brigjen TNI Zainul Bahar dalam Apel Kesiapsiagaan Kodam IV/Diponegoro dalam rangka Kesiapan Pengamanan Pemilu 2024, di Lapangan Parkir Stadion Mandala Krida, Rabu (17/1). Wakil Gubernur (Wagub) DIY, Sri Paku Alam X turut serta meninjau pasukan gabungan pada Apel Kesiapsiagaan Kodam IV/Diponegoro dalam rangka Kesiapan Pengamanan Pemilu 2024. Apel kesiapsiagaan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Korem 072/Pamungkas, Brigjen TNI Zainul Bahar.

Menurut Zainul, apel bertujuan untuk mengecek dan memastikan kesiapan pasukan dan perlengkapan satuan jajaran TNI Polri di DIY. Pasukan gabungan pengamanan itu tengah menghadapi tugas pengamanan Pemilu yang saat ini sedang berlangsung dengan rangkaian tahapannya. "Seperti kita ketahui bersama tahapan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota legislatif, tentunya memiliki potensi konflik yang tinggi dan kompleks. Untuk itu, guna menjamin keamanan dan kelancaran pesta demokrasi rakyat, kita dituntut untuk mampu bekerja sama dengan seluruh komponen bangsa guna mewujudkan stabilitas keamanan dan kondusivitas di wilayah," terangnya. Zainul Bahar menambahkan, apel kesiapsiagaan pengamanan Pemilu 2024

digelar secara serentak dengan melibatkan satuan dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, Polri, dan Linmas dilaksanakan delapan titik di Jawa Tengah dan DIY, dengan jumlah total 5.610 personel. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai pedoman dan pelaksanaan tugas oleh seluruh peserta apel gabungan di wilayah DIY. Diantaranya seluruh peserta yang terlibat dalam pengamanan wajib menguatkan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini jadi faktor penting sebagai pondasi utama dalam bertugas agar senantiasa diberikan keselamatan dan keberkahan. Selain itu berpegang teguh pada netralitas TNI Polri selama berlangsungnya proses pemilu dan tidak mudah terprovokasi atau terpancing emosi. Jangan sampai terjadi pelanggaran yang dapat merusak citra TNI Polri di mata masyarakat. "Tunjukkan bahwa TNI Manunggal dengan rakyat melalui kegiatan bakti sosial dan senantiasa hadir untuk membantu mengatasi kesulitan rakyat," ujarnya. **(Ria)-f**

Gandung Pardiman: Golkar Dukung Penuh Revisi UU Desa



KR-Istimewa

Gandung Pardiman

YOGYA (KR) - Anggota DPR RI Fraksi Golkar Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta Gandung Pardiman dengan tegas menyatakan Golkar mendukung penuh revisi Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Gandung Pardiman mengatakan, revisi UU Desa membahas berbagai hal krusial, antara lain terkait masa perpanjangan jabatan kepala desa, status aparat desa, kesejahteraan kepala desa dan aparat desa, operasional pemerintahan desa, alokasi dana pembangunan desa, hingga arah kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

"Semua ini dimaksudkan agar pembangunan di desa berjalan lancar, efektif, dan efisien. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa," tegas Gandung Pardiman dalam keterangan persnya Rabu (17/1).

Gandung Pardiman menambahkan, pihaknya sejak awal memper-

juangkan untuk peningkatan kesejahteraan desa. Politisi senior Partai Golkar DIY ini memiliki visi misi desa sebagai pusat pertumbuhan. Oleh karena itu revisi UU Desa diharapkan bisa meningkatkan tata kelola dan kualitas sumber daya manusia desa, untuk mengantisipasi dinamika perkembangan desa yang semakin cepat belakangan ini.

"Proses revisi UU Desa berjalan lancar dan Fraksi Golkar akan terus mengawal sampai revisi ini disahkan," tandasnya.

Menurut Gandung Pardiman, hal lain tentang desa yang harus dikaji serius adalah menciptakan stabilitas pembangunan di desa. Ia berpendapat jangan sampai pembangunan desa mengganggu konflik antarwarga akibat dari Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Pilkades seringkali memberikan efek lanjutan berupa keretakan hubungan antarwarga yang berbeda pilihan. Sehingga Gandung yang ju-

ga Ketua DPD Golkar DIY ini berpendapat pentingnya perpanjangan masa jabatan kepala desa.

"Salah satu yang dibahas dalam revisi adalah perpanjangan masa jabatan kepala desa. Ini penting agar tercipta stabilitas pembangunan di level desa. Maka kami dukung penuh revisi UU Desa agar jabatan kepala desa minimal 9 tahun dan bisa dipilih kembali dengan periodisasi jabatan selama dua periode," ungkapnya.

Selain terkait kepala desa, revisi UU Desa juga membahas terkait status aparat desa, kesejahteraan kepala desa dan aparat desa, operasional pemerintahan desa, alokasi dana pembangunan desa, hingga arah kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Revisi UU Desa ini, imbu Gandung ditujukan untuk penguatan desa. Mengingat dalam APBN 2023, pemerintah dan DPR RI telah mengalokasikan dana desa mencapai Rp 70 triliun yang dialokasikan bagi 74.954 desa di 434 kabupaten/kota.

"Dengan adanya kebijakan pemerintah seperti itu dan dengan adanya revisi UU Desa maka saya berharap nantinya desa benar-benar menjadi pusat pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa," pungkas Gandung Pardiman. **(Dev)-f**

38 SIMPANG GUNAKAN TEKNOLOGI ATCS

Durasi Lampu APILL di Pingit Paling Panjang

YOGYA (KR) - Hingga saat ini durasi lampu Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) di simpang Pingit merupakan yang paling panjang dibanding simpang lain di Kota Yogya. Meski demikian hal tersebut justru cukup efektif dalam mengurai antrean kendaraan.

Plt Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Yogya Hary Purwanto, menjelaskan lalu lintas di simpang Pingit selama ini juga cukup padat. Hal ini karena kawasan tersebut menjadi akses keluar dan masuk wilayah Kota Yogya. "Durasi maksimal lampu APILL di simpang Pingit maksimal 120 detik. Memang durasi lampu merah agak lama, tapi hijaunya lama juga dan antrean kendaraan langsung habis," jelasnya, Rabu (17/1).

Rata-rata durasi lampu APILL di simpang lain di Kota Yogya tidak mencapai 100 detik. Terutama yang sudah menerapkan teknologi Area Traffic Control System (ATCS). Dari total 58 simpang yang disertai APILL di Kota Yogya, sebanyak 38 simpang di antaranya sudah menggunakan teknologi ATCS. Dengan teknologi tersebut maka durasi lampu bisa dikendalikan melalui ruang kontrol yang ada di Dinas Perhubungan Kota Yogya. Berbeda dengan APILL non ATCS, untuk menyesuaikan durasi lampu harus diseting ke lapangan.

Khusus lampu APILL di simpang Pingit, selain telah menggunakan teknologi ATCS juga sudah dilengkapi dengan sistem detektor. Fungsinya untuk menambah daya dukung optimal-

isasi durasi lampu. "Sistem detektor itu untuk melihat kendaraan paling belakang. Ketka lampu hijau menyala, kita pastikan bahwa kendaraan paling belakang sudah habis. Makanya meski durasi lampu merah agak lama namun antrean kendaraan di tiap simpang di sana akan terkuras," imbuh Hary.

Dirinya menargetkan, seluruh simpang dengan APILL di Kota Yogya bisa menerapkan teknologi ATCS meskipun pengadaannya secara bertahap. Hal ini karena pengadaan perangkat ATCS membutuhkan anggaran yang cukup besar mencapai ratusan juta rupiah, belum termasuk kelengkapan kamera. Teknologi ATCS yang dipadukan dengan penggunaan kamera di tiap simpang juga sangat ideal untuk pengaturan lalu lintas. **(Dhi)-f**

CAPAIAN IMUNISASI IPV TERGOLONG TINGGI

Tak Ada Temuan Kasus Polio di Kota Yogya

YOGYA (KR) - Sepanjang tahun 2023 lalu dipastikan tidak ada temuan kasus polio pada anak yang ada di Kota Yogya. Hingga akhir tahun ini pun diharapkan tidak ada temuan kasus serupa seiring tingginya capaian imunisasi Inactive Polio Vaccine (IPV) yang tergolong tinggi.

Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogya Lana Unwanah, menjelaskan capaian imunisasi IPV di Kota Yogya rata-rata sudah berada di angka lebih dari 97 persen. Hal itu merupakan suntikan dosis pertama hingga ketiga. "Untuk tahun 2023 cakupan imunisasi IPV dosis pertama mencapai 98,87 persen, kemudian imunisasi IPV dosis kedua 98,29 persen dan imunisasi IPV dosis ketiga 97,66 persen. Jadi kalau dirata-rata capaiannya secara keseluruhan sudah berada di atas 97 persen," terangnya, Rabu (17/1).

Pihaknya menyampaikan pemberian imunisasi IPV atau vaksin polio suntik dosis pertama hingga ketiga diberikan pada anak usia dua bulan, tiga bulan, dan empat bulan. Suntikan itu lebih efektif dibandingkan dengan vaksin polio oral atau OPV. Sejak tahun 2007 di wilayah DIY termasuk Kota Yogya dari dosis pertama, kedua hingga ketiga sam-

pai sekarang menggunakan IPV atau vaksin polio suntik. Sementara di beberapa daerah lain IPV hanya satu kali sisanya menggunakan vaksin oral atau OPV.

Lana juga mengungkapkan, jika mendapati anak yang belum imunisasi IPV maka diimbau agar segera dilaporkan ke puskesmas terdekat. Hal ini supaya bisa secepatnya mendapatkan imunisasi polio. Dengan harapan cakupan imunisasi IPV dosis pertama hingga ketiga di Kota Yogya bisa mencapai 100 persen, sehingga anak-anak bisa terlindung dari infeksi semua varian ataupun tipe virus polio. "Polio tidak ada obatnya, pengobatan hanya suportif dan simptomatis melalui fisioterapi. Namun polio dapat dicegah dengan pembentukan imunitas dengan vaksininasi. Untuk itu bagi para orangtua dan juga masyarakat jangan menunda untuk memberikan imunisasi IPV pada anak maupun imunisasi dasar lengkap lainnya sesuai anjuran pemerintah," imbaunya.

Dirinya juga menambahkan Pemkot Yogya akan terus menguatkan surveilans atau pengawasan di puskesmas. Sehingga pelayanan imunisasi IPV dan imunisasi dasar lengkap lainnya yang bisa diakses secara gratis di 18 puskesmas Kota Yogya cakupannya bisa maksimal. **(Dhi)-f**

Penguatan Istithaah Kesehatan Untuk Haji Sehat Maburr 2024

YOGYA (KR) - Dalam rangka penguatan istithaah kesehatan haji, KBIH Bina Umat selalu memberikan manasik kesehatan bersinergi dengan alumni PKHI. "Sebab, ibadah haji tidak hanya bagi yang mampu secara finansial, tapi juga kesiapan kesehatan dan fisik," sebut Perawat RSJ Ghrasia Yogyakarta yang juga alumni PKHI, Fasilitator sekaligus pengurus FPKHI Retno Murniati SST dalam manasik kesehatan bertema 'Penguatan Istithaah Kesehatan untuk Haji Sehat Maburr 2024' di Hall APMD Yogyakarta, awal pekan ini.

Kegiatan manasik kesehatan diawali skrining kesehatan dengan pengukuran vital sign juga assesment riwayat kesehatan yang diikuti lebih 65 jemaah haji. Turut hadir mendampingi calon PKHI dr Murtafiah SpS dan Sri Damayanti serta pengurus FPKHI DIY Dian Damayanti. "Prinsip penyelenggaraan kesehatan haji dimulai dari pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang salah satu tujuannya tercapai istithaah kesehatan sehingga bisa melaksanakan ibadah haji sesuai syariat," ucap Retno.

Dijelaskan bahwa Istithaah kesehatan merupakan kemampuan jemaah yang

terukur, baik fisik dan mental sehingga bisa melaksanakan ibadah sesuai tuntunan. Beberapa pesan kesehatan untuk jemaah haji juga turut disampaikan, seperti informasi skema haji 2024 tidak ada pembatasan usia, prioritas jemaah lansia, tanpa pendamping dan penetapan istithaah kesehatan baru pelunasan.

Juga terkait cara yang bisa dilakukan untuk mempertahankan istithaah kesehatan, yaitu dari diet yang seimbang, mengelola stres, PHBS dan membiasakan minum air putih, meningkatkan kebugaran dengan membiasakan aktifitas fisik dengan jalan kaki setiap hari sesuai kemampuan. "Juga terkait monitoring kesehatan untuk jamaah dengan penyakit komorbid," katanya.

Selain itu juga paparan materi KMK RI No HK 01.07/Menkes/2118/2023 terkait standar teknis pemeriksaan kesehatan dalam rangka penetapan istithaah kesehatan jemaah haji yang di dalamnya terkait tahapan pemeriksaan kesehatan dari pemeriksaan fisik penunjang, gizi, gigi dan kejiwaan. Termasuk pemeriksaan kognitif untuk mengetahui proses pikir jemaah haji resiko tinggi dan pemeriksaan ADL untuk mengetahui kemampuan aktivitas fisik secara mandiri jemaah haji. **(Feb)-f**

TANGGAP BENCANA ERUPSI GUNUNG LEWOTOBI LAKI-LAKI BRI Distribusikan Bantuan Bagi Korban Terdampak



BRI melalui CSR BRI Peduli membantu warga yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.

KR-Istimewa

FLORES TIMUR (KR) – Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengeluarkan abu panas atau erupsi pada Senin (01/01/2023). Badan Meteorologi dan Geofisika telah menetapkan status siaga darurat bencana alam imbas erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki berlaku sejak 1 Januari 2024 hingga 14 Januari 2024.

BRI melalui aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) BRI Peduli bergerak cepat merespon bencana alam tersebut dan bahu membahu membantu warga yang terdampak. Berbagai bantuan tanggap bencana diberikan berupa air mineral, sembako, obat-obatan dan sebagainya. Bantuan tanggap darurat tersebut disalurkan oleh insan BRILian (pekerja BRI) melalui BRI Kantor Cabang Larantuka yang merupakan unit kerja terdekat dengan wilayah terdampak bencana. Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernandi mengatakan bahwa gerak cepat penyaluran bantuan kepada korban bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki merupakan wujud kepedulian BRI terhadap warga yang terdampak. Bantuan yang diberikan diharapkan dapat meringankan beban para korban. "Kami terus bekerja sama dan berkolaborasi dengan semua pihak untuk bahu membahu meringankan beban masyarakat terdampak," ungkapnya.

Hendy juga menginformasikan bahwa layanan perbankan pada BRI Unit Kerja Boru yang berada di wilayah sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki tidak terdampak secara signifikan. Dapat dipastikan bahwa layanan tetap berjalan normal dan diharapkan kegiatan perekonomian dapat segera berangsur pulih dan masyarakat dapat segera beraktivitas normal kembali.

"Operasional perbankan BRI di sekitar wilayah terdampak tetap berjalan tanpa gangguan dan BRI terus melayani kebutuhan layanan perbankan di sekitar lokasi bencana. Kami juga menyarankan nasabah untuk bisa memanfaatkan aplikasi super apps BRImo serta keberadaan AgenBRILink terdekat untuk kebutuhan layanan transaksi perbankan," tambah Hendy. **(Sal)**



Bantuan BRI Peduli untuk di distribusikan bagi warga yang terdampak erupsi

KR-Istimewa